

## **KEBUTUHAN UMKM AKAN FASILITASI LEGALITAS, DUKUNGAN KAMPUS DAN INSTANSI TERKAIT MENUJU KESIAPAN EKSPOR**

**Endang Purwaningsih<sup>\*)</sup>**  
[e.purwaningsih@yarsi.ac.id](mailto:e.purwaningsih@yarsi.ac.id)

**Muslikh<sup>\*)</sup>**  
[muslikh@yarsi.ac.id](mailto:muslikh@yarsi.ac.id)

**Suhaeri<sup>\*)</sup>**  
[Suhaeri@yarsi.ac.id](mailto:Suhaeri@yarsi.ac.id)

(Diterima 18 Juni 2023, disetujui 01 September 2023)

### **ABSTRACT**

*MSMEs as partners in lecturer research activities or dedicating their knowledge, can be a vehicle for accommodating the intellectual work of the academic community, and can also be directed as a vehicle for implementing the Freedom to Learn Campus Merdeka policy. This urgency arises when the harmonization of research implementation needs to continue to be developed, then build start-up companies (spin off), grow industrial clusters and attract industrial investors in the region. The problems studied include (1) MSME needs related to legality facilitation; and (2) Stakeholder support including campuses in the framework of export readiness. The research method used is the participatory research approach, sociology approach and statute approach. Regarding the needs of MSMEs for facilitation of legality, it is very clear that they need it, not only that, but they need to be assisted until it is operational and beneficial for their business. Stakeholder support including campuses in the framework of export readiness is urgently needed by MSME actors, especially from campuses, banking and BUMN CSR, Health and BPOM services, KemenkumHAM, Notaries, Food Services, local governments.*

**Keywords:** *MSMEs, legality, campuses, related agencies, exports*

---

<sup>\*)</sup> Guru Besar Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

<sup>\*)</sup> Dosen Universitas YARSI, Jakarta

<sup>\*)</sup> Dosen Universitas YARSI, Jakarta

## ABSTRAK

UMKM sebagai mitra dalam kegiatan dosen meneliti atau pun mengabdikan ilmunya, dapat menjadi wahana mewadahi karya intelektualitas civitas akademika, juga dapat diarahkan sebagai wahana implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Urgensi ini mengemuka ketika harmonisasi pelaksanaan penelitian, perlu terus dikembangkan, kemudian membangun perusahaan pemula (*spin off*), menumbuhkan kluster industri dan menarik investor industri dalam kawasan. Permasalahan yang dikaji meliputi (1) Kebutuhan UMKM terkait fasilitasi legalitas; dan (2) Dukungan *stakeholders* termasuk kampus dalam rangka kesiapan ekspor. Metode penelitian yang digunakan adalah *participatory research approach*, *sosiologis approach* dan *statute approach*. Terkait kebutuhan UMKM akan fasilitasi legalitas sangat jelas mereka membutuhkan, tidak hanya itu, akan tetapi perlu didampingi hingga operasionalnya dan bermanfaat bagi usahanya. Dukungan *stakeholders* termasuk kampus dalam rangka kesiapan ekspor sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, utamanya dari kampus, perbankan dan CSR BUMN, Dinas Kesehatan dan BPOM, KemenkumHAM, Notaris, Dinas Pangan, Pemerintah daerah.

**Kata kunci:** UMKM, Legalitas, Kampus, Instansi Terkait, Ekspor

### I. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikenal terpuruk saat pandemic, pelan-pelan bangkit dan pulih kembali. Berbagai program pemulihan telah dijalankan, kebijakan diterapkan, peran *stakeholders* pun mengulurkan daya juang untuk kembali tangguh menghadapi masa depan. Semua pihak baik institusi terkait, pemerintah daerah juga kampus bergerak merangkul pelaku UMKM, hingga keberdayaan pun eksis kembali. Bergairahnya kreativitas mahasiswa dan dosen, seiring Kampus Merdeka Belajar (MBKM) dapat disinergikan dengan kinerja UMKM, dituangkan dalam karya inovatif, dipadukan dengan kebutuhan dunia usaha, sekaligus menambah penguatan *softskill* dan *hardskill* SDM kampus. Civitas akademika membutuhkan wadah untuk mengimplementasikan idenya, karya ilmu dan teknologinya, akhirnya gagasan ekosistem yang mengedepankan inovasi kampus, berkolaborasi dengan pihak terkait, akan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, serta menunjukkan citra keunggulan kampus. *Science Techno Park* banyak dibangun di Indonesia, namun kemitraan dengan pemerintah daerah perlu diperhatikan, karena sebenarnya pemerintah daerah lah yang paling mengerti kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat di daerahnya, kompetensi sumber daya yang ada berikut keunikan lokalnya. *Science Techno Park* ini selain mewadahi karya intelektualitas civitas akademika, juga dapat diarahkan sebagai wahana

implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Urgensi ini mengemuka ketika harmonisasi pelaksanaan penelitian, perlu terus dikembangkan, kemudian membangun perusahaan pemula (*spin off*), menumbuhkan kluster industri dan menarik investor industri dalam kawasan *science techno park* yang dibangun. Dengan STP ini kampus bisa mewadahi ratusan pelaku UMKM bersinergi dengan hasil karya kampus dan masyarakat.

Civitas akademika difasilitasi, dijumpatani untuk berinteraksi dengan dunia bisnis yang sesungguhnya, kebijakan atau regulasi pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia bisnis serta masyarakat. Urgensi eksistensi investor dalam hal ini dunia usaha, dunia kerja dan industri serta lembaga penyuplai dana menjadi sangat penting. Demikian juga, daerah tentu sudah memiliki sistem inovasi, namun perlu disinergikan dengan optimalisasi peran-peran *stakeholders* dalam hal ini civitas akademika yang secara konsisten berkomitmen menjalankan hilirisasi IPTEK guna meningkatkan ekonomi daerah beserta sistem inovasinya.

Civitas akademika membutuhkan wadah untuk mengimplementasikan idenya, karya ilmu dan teknologinya, gagasan membentuk ekosistem yang mengedepankan inovasi kampus, berkolaborasi dengan pihak terkait, akan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, serta menunjukkan ciri keunggulan kampus. Sistem inovasi yang berorientasi *Science Techno Park* selain mewadahi karya intelektualita civitas akademika, juga diarahkan menjadi wahana implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mutualisme yang unggul antara dunia kampus, pemerintah, masyarakat serta dunia usaha. Jadi permasalahan yang menjadi batasan adalah (1) prinsip dasar kolaborasi sistem inovasi daerah dengan peran Kampus Merdeka; (2) rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan *stakeholders*, dan (3) model hilirisasi yang tepat dalam pelaksanaan peran civitas akademika kampus merdeka dalam sistem inovasi daerah berorientasi *science techno park*.

Diperlukan penelitian yang mengkaji prinsip dasar kolaborasi sistem inovasi daerah dengan peran Kampus Merdeka; untuk mendukung kemampuan bersaing UMKM, ketangguhan usaha, kesiapan ekspor, merumuskan dan merekomendasikan kebijakan yang sesuai dengan *stakeholders*, dan membuat model hilirisasi yang tepat dalam pelaksanaan peran civitas akademika kampus merdeka dalam sistem inovasi daerah berorientasi *science techno park* yang mewadahi sentra usaha UMKM.

Model hilirisasi hasil riset civitas akademika MBKM, berkolaborasi dengan sistem inovasi daerah dalam upaya saling memberikan manfaat, bantuan teknologi, informasi, saling memberikaan pembelajaran, pengembangan SDM, peran aktif kedua pihak baik kampus maupun industri. Urgensi ini mengemuka ketika harmonisasi pelaksanaan penelitian, perlu terus dikembangkan, kemudian membangun perusahaan pemula (*spin off*), menumbuhkan kluster industri dan menarik investor industri dalam kawasan *science techno park*. Jadi sudah saatnya jalinan kerjasama MBKM dengan daerah, bisnis dan masyarakat lebih difokuskan pada karakteristik keunikan sebagai keunggulan daerah, meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyebarkan performa dan promosi (*branding*) hasil IPTEK karya kampus.

Permasalahan yang dikaji meliputi (1) Kebutuhan UMKM terkait fasilitasi legalitas; dan (2) Dukungan *stakeholders* termasuk kampus dalam rangka kesiapan ekspor.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *participatory research approach*, *sociologisch approach* dan *statute approach*. Sumber data diperoleh dari: (1) data sekunder dari instansi terkait (2) data primer langsung dari UMKM dan (3) wawancara dan pengamatan dengan narasumber dan mitra perkumpulan UMKM.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kebutuhan UMKM terkait fasilitasi legalitas

Berdasarkan kuesioner yang dilakukan spontan pada saat pelatihan di 2 area baik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta, ditambahkan hasil kuesioner bit.ly gform, terhadap mitra berjumlah 224 responden, diketahui sebagai berikut.

**Tabel 1.** Distribusi Frekuensi kebutuhan dukungan UMKM

Jawaban	No. 1		No. 2		No. 3	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Sangat tidak butuh	0	0	0	0	0	0
Tidak butuh	3	1.3	2	.9	2	.9

Cukup butuh	30	13.4	33	14.7	28	12.5
Butuh	99	44.2	96	42.9	99	44.2
Sangat butuh	92	41.1	93	41.5	95	42.4
Jumlah	224	100.0	224	100.0	224	100.0

Sumber: data primer diolah 2022

### 3.2. Kebutuhan fasilitasi legalitas

Tabel 1 menunjukkan bahwa, untuk butir nomor 1 diperoleh skor terbesar untuk yaitu 5 (Sangat membutuhkan), dan skor terendah yaitu 2 (tidak membutuhkan), dengan rata-rata 4,25 (dibulatkan menjadi 4 atau membutuhkan), standar deviasi, 0,73 dan variance 0,53. Tabel 2 menunjukkan bahwa pada butir nomor 1, Berdasarkan hasil analisis dapat dipahami bahwa dari total responden sebanyak 224 orang, jumlah responden yang sangat membutuhkan dukungan legalitas dan fasilitasnya sebanyak 92 orang (41,1%), membutuhkan sebanyak 99 orang (44,2 %), cukup membutuhkan sebanyak 30 orang (13,4%), dan kurang membutuhkan sebanyak 3 orang (1,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden membutuhkan fasilitasi legalitas dalam menunjang ekspor. Legalitas ini tidak hanya legal entity and legal product, namun juga pendampingan ekspor, seperti standarisasi produk, pengurusan kelengkapan ekspor, penjajagan pasar, uji coba dan seterusnya.

Pelaku UMKM menyadari bahwa legalitas adalah sesuatu yang wajib dimiliki sebagai bekal untuk melangkah maju. semua akses tertutup jika tanpa pemenuhan legalitas. Legalitas usaha yang penting bagi skala UMKM antara lain ijin administrasi berupa NPWP, NIB, IUMK, SIUP dan tidak kalah pentingnya adalah merek serta ijin edar. Kaitannya dengan usaha UMKM, maka tentu berpengaruh signifikan bagi lajunya penjualan produk di pasar, dan berpotensi lebih banyak peluang lolos dalam pengajuan proposal baik kepada pemerintah, swasta, CSR BUMN; juga terjamin keamanannya dalam mengoperasikan perusahaan, dengan demikian terlindungi secara hukum, di sisi lain menambah kepercayaan

masyarakat calon konsumen atau pihak ketiga) yang akan bekerjasama dengan perusahaan yang lengkap legalitasnya, apalagi untuk ekspor. Legalitas untuk keperluan ekspor antara lain badan hukum, yang memenuhi kelengkapan ijin usaha, juga *legal product* yang standar memenuhi syarat yang dipersyaratkan negara yang dituju. UMKM juga perlu didampingi dalam uji coba ekspor, dibukakan akses promosi di berbagai negara asing, untuk dapat memperkenalkan produk andalannya yang mungkin diminati oleh konsumen di manca negara.

Selain legalitas, dalam meningkatkan daya saing, perlu branding hasil inovasi yang terus menerus. Inovasi bertujuan untuk memberikan dan menyalurkan nilai tambah (*added value*) terhadap konsumen yang lebih baik. Pada dasarnya, tujuan utama dari inovasi adalah terciptanya suatu ide atau gagasan yang baru sehingga dapat diaplikasikan atau diimplementasikan pada produk maupun proses yang akan dilakukan. Pendekatan inovasi terdiri dari dua sudut pandang, yaitu pendekatan strukturalis dan pendekatan proses. Pada pendekatan strukturalis, sebuah inovasi dipandang sebagai suatu unit berdasarkan parameter yang tetap, yaitu teknologi dan manajemen, sedangkan pada pendekatan proses, suatu inovasi dipandang sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan berbagai kelompok sosial di dalam perusahaan (Hartini, 2012).

Inovasi menjadi faktor penentu dalam menghadapi persaingan industri yang terjadi, di mana inovasi menjadi senjata yang tangguh agar dapat unggul dalam menghadapi persaingan. Adanya kemampuan untuk menciptakan atau mengimplementasikan atas gagasan atau ide yang baru dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam menciptakan suatu produk yang unik dan berkualitas. Dengan kualitas produk yang tinggi, selain dapat meningkatkan kinerja perusahaan, juga dapat menjadi indikator keberhasilan keunggulan bersaing pada suatu perusahaan.

Kapasitas inovasi merupakan kemampuan perusahaan untuk terus berinovasi melebihi dari para pesaingnya. Kemampuan yang harus dilakukan perusahaan untuk masuk ke pasar baru, melompat ke tingkat kualitas yang baru lebih awal dari para pesaingnya, atau memaksa perusahaan untuk meniru dan meningkatkan kualitas lebih cepat daripada pesaingnya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Kapasitas inovasi

mencakup berbagai faktor yang memungkinkan perusahaan untuk tetap inovatif dalam jangka panjang, seperti yang disoroti oleh Man *et al.* (2002), usaha kecil bukanlah versi yang diperkecil dari perusahaan besar. Perusahaan besar dan kecil berbeda satu sama lain dalam hal struktur perusahaan, adaptasi terhadap lingkungan, gaya manajerial, dan yang lebih penting, cara mereka bersaing dengan perusahaan lain.

UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan besar, sehingga ketika kita berbicara mengenai kapasitas inovasi UMKM harus dianalisis dan secara jelas mempertimbangkan karakteristik UMKM itu sendiri. Selain itu, kapasitas inovasi dapat dibedakan dari sumber daya. Sumber daya mewakili sekumpulan faktor yang tersedia yang dimiliki oleh perusahaan. Perspektif sumber daya menjelaskan kemampuan perusahaan untuk berinovasi berdasarkan asetnya saat ini, dikarenakan UMKM memiliki limitasi sumber daya maka integrasi jaringan menjadi faktor yang penting dari kapasitas inovasi. Integrasi jaringan memungkinkan UMKM untuk dapat mengakses sumber daya dan untuk membagi risiko dan biaya.

Dalam penggunaannya, seringkali kemampuan (*ability*), kapabilitas (*capability*), dan kapasitas (*capacity*) dianggap memiliki pengertian yang sama, yaitu menunjukkan kekuatan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Kapabilitas inovasi adalah suatu proses untuk mengembangkan konsep dan produk baru untuk penggunaan komersial dan membawanya ke pasar, mempromosikan, mengembangkan dan meningkatkan atau menciptakan produk baru, proses, teknik, dan manajemen sistem (Chamsuk *et al.* 2015). Inovasi menjadi faktor penting bagi pelaku usaha untuk dapat tumbuh dan mempertahankan posisi persaingannya, sehingga adanya kapabilitas atau kapasitas inovasi ini menjadi fungsi penting dalam manajemen karena berhubungan dengan kinerja bisnis perusahaan.

Banyak UMKM yang pada awalnya berkembang baik, namun dalam perjalanannya mengalami permasalahan akibat kesalahan dalam menyikapi perubahan. Keputusan yang diambil jadi tidak tepat dan kurang efisien. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kemampuan SDM dalam memahami permasalahan ada akibat terbatasnya data dan

informasi yang dikuasai. Disinilah peran *business intelegent* sangat penting sebagai penyedia informasi yang tepat mengenai kondisi bisnis saat ini sehingga diperoleh strategi yang lebih tepat untuk diambil. Hal ini dapat berdampak terhadap kegiatan usaha UMKM untuk dapat meraih *competitive advantage* dan *sustainability* atau keberlangsungan usaha yang lebih panjang (Khairin *et al.* 2021).

Tantangan yang dihadapi pemerintah terhadap ekonomi digital yakni kemampuan untuk menciptakan kebijakan, seperti kemudahan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, insentif perpajakan, dan pembinaan penguasaan teknologi digital bagi UMKM (Sayekti 2018). Digitalisasi UMKM dapat dilakukan dengan membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar sehingga dapat memperluas pangsa pasar (Astuti *et al.* 2020). Selain itu, adanya digitalisasi juga dapat membantu UMKM dalam mengurangi biaya operasional, khususnya biaya pemasaran (*marketing*). Pemasaran melalui dunia digital dinilai lebih efektif dan efisien dengan biaya pemasaran yang rendah. Secara umum UMKM belum menerapkan strategi bisnis secara konsisten, serta tidak memiliki strategi pemasaran khusus dan hanya menggunakan SDM yang ada meskipun memiliki keahlian yang minim.

Mengingat kebutuhan untuk naik kelas, (dalam buku pengukuhan guru besar Endang Purwaningsih, 2022) UMKM perlu didampingi dalam perolehan HKI.

Retnaningsih (2020) menyatakan bahwa diperlukan inovasi teknologi guna meningkatkan keunggulan kompetitif dan daya saing produk unggulan daerah. Penulis sependapat dengan Retnaningsih ini, makin local seharusnya makin unik dan berkarakter khusus, tidak dimiliki daerah lain, sehingga bisa ditingkatkan menjadi produk unggulan daerah.

Amriani dan Prihatin (2019) menyatakan kendala implementasi STP yakni *lack of experts to implement the program; dan weak community participation*. Mustafa, dkk. (2020) menyatakan bahwa sumber daya menjadi salah satu faktor utama akselerasi pengembangan. Muhammad (2017) menyatakan bahwa perlu prinsip keterbukaan dan interaksi yang berkelanjutan dari seluruh 'people' yang terlibat akan menciptakan suasana yang mengkatalis proses inovasi khususnya terkait



komersialisasi ide dan penemuan hingga menjadi produk inovatif bahkan hingga ke skala industri.

Yulianti (2016) menyatakan dukungan perguruan tinggi pada inovasi maupun kualitas hubungan dengan pimpinan berpengaruh signifikan pada perilaku inovatif dosen dan peran iklim kreatif memperkuat perilaku inovatif. Kamalia & Andriansyah (2021) menyatakan bahwa *Students feel that MBKM learning is not optimal because it is done online*. Pengusul sependapat, namun jika sudah *offline* tentu lebih terwadahi aspirasi kreativitasnya, baik karya inovasi mahasiswa maupun dosen dalam bentuk solusi yang dibutuhkan masyarakat maupun gagasan yang benar-benar baru secara progresif melihat dinamika pembangunan. *Stakeholders* pembangunan di daerah tentu perlu pelibatan yang serius dan berkesinambungan, harmoni dengan kebijakan pemerintah pusat. Soares (2015) menyatakan pemerintah daerah berperan sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan Stimulator. Terkait sistem inovasi daerah, Zulfikar dan Jumiati (2020) menyatakan strategi kebijakan perlu dikembangkan sebagai kesatuan kerangka kebijakan inovasi untuk memperkuat sistem. Penguatan sistem inovasi berarti membenahi sistem secara terstruktur.

Sebagai pendidik yang sekaligus harus haus belajar, peneliti dan pengabdian, dalam regulasi telah diterakan bahwa perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu dosen agar mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dedikasi dosen menurut Gunawan (2015) yaitu *“The principal tasks of lecturers in the faculty taskload regulation covering the fields of, research and community. Besides the main task of the lecturer also has another, namely academic and professional development and participation in higher education”*.

Peran civitas akademika, sistem inovasi daerah tentu tidak lepas dari semangat produktif digital dan *e commerce*, yang mampu meningkatkan performa keunggulan produk daerah berkolaborasi dengan karya intelektualita dosen dan mahasiswa, kemampuan daya saing menjadi pertimbangan utama. Perlu digaribawahi bahwa fungsi *e-commerce* dapat secara efektif bekerja dengan memahami perilaku

konsumen dan pesaing. Jayakumar (2016) menyatakan *"To get a competitive advantage from competitors it is necessary to understand aspects of utility behavior and customer satisfaction; understand aspects of behavior that affect customer attitudes, preferences and choices; understand heuristics involved in consumer decision making; and understand the possibility of the company's strategy based on a thorough analysis of the influence of behavior on customer decisions. "*

Macchion, et.,al (2017) menyatakan *"e-commerce improves the performance of innovation but has no relationship that has a strong influence on business and operational performance."*

Kremez (2019)*"E-commerce must be integrated with the overall business for optimal performance. The two main ways in structuring e-commerce are centralization and decentralization."*

### **3.3. Dukungan stakeholders termasuk kampus dalam rangka kesiapan ekspor**

Peran stakeholder UMKM sangat diharapkan oleh para pelaku UMKM. Ratih (wawancara di Semarang, 16 September 2022) Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menyatakan bahwa perlu dorongan dari pemerintah, dikarenakan jumlah UMKM cenderung naik akibat pandemic yang memaksa mereka untuk 'mencari uang', dan pelan-pelan akan berkurang karena tidak sanggup bertahan dan bersaing. Mereka banyak yang musiman, tidak professional, sehingga perlu diadakan pembinaan berkesinambungan.

Menurut Handayani, pelaku UMKM Yogyakarta (Yogyakarta, 17 September 2022) yang usahanya sedang berkembang pesat, kata kuncinya adalah lengkapi legalitas, banyak menjalin kerjasama, rajin-rajin aktif dalam program Dinas terkait, manfaatkan CSR BUMN, inovasi dan web perusahaan dipercantik, promo jangan dilewatkan, maka peluang ekspor akan terbuka lebar.

Tabel 1 menunjukkan bahwa, butir nomor 2 diperoleh skor terbesar untuk yaitu 5 (Sangat membutuhkan), dan skor terendah yaitu 2 (tidak membutuhkan), dengan rata-rata 4,25 (dibulatkan menjadi 4 atau membutuhkan), standar deviasi, 0,73 dan variance 0,53. Tabel 2 menunjukkan bahwa pada butir nomor 3, dari total responden sebanyak

224 orang, jumlah responden yang sangat membutuhkan dukungan kampus sebanyak 93 orang (41,5%), membutuhkan sebanyak 96 orang (42,9 %), cukup membutuhkan sebanyak 33 orang (14,7%), dan kurang membutuhkan sebanyak 2 orang (0,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden membutuhkan dukungan kampus. Mereka juga berharap mendapat bantuan mahasiswa magang khususnya dalam bidang IT, Bahasa Inggris dan pemasaran.

Tabel 1 menunjukkan bahwa, butir nomor 3 diperoleh skor terbesar untuk yaitu 5 (Sangat membutuhkan), dan skor terendah yaitu 1 (sangat tidak membutuhkan), dengan rata-rata 3,91 (dibulatkan menjadi 4 atau membutuhkan), standar deviasi, 0,98 dan variance 0,96. Tabel 2 menunjukkan bahwa pada butir nomor 4, dari total responden sebanyak 224 orang, jumlah responden yang sangat membutuhkan peran stakeholders sebanyak 95 orang (42,4%), membutuhkan sebanyak 99 orang (44,2%), cukup membutuhkan sebanyak 28 orang (12,5%), dan kurang membutuhkan sebanyak 2 orang (0,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden membutuhkan peran stakeholders, yakni semua instansi terkait baik perbankan, pemerintah daerah, Dinas terkait seperti Koperasi dan UKM, Dinas Pangan dan Kesehatan, BPOM dan Notaris.

Menurut Pemilik CV Sekarjawi (Yogyakarta), Dian (wawancara 17 September 2022) menyatakan bahwa perusahaannya sangat terbuka bagi para mahasiswa untuk magang, bahkan dia sangat mengharapkan bantuan kampus khususnya dalam hal SDM yang menguasai pemasaran, IT, dan Bahasa Inggris.

Demikian juga diutarakan oleh Handayani (Yogyakarta) dan Mei (Yogyakarta), dan Fajar dan Sobirin (Jawa Tengah) wawancara periode Juli- September 2022, bahwa selain berharap bantuan dari kampus, juga dari stakeholders lain yang berkaitan langsung dengan produksi dan pemasaran.

Instansi lain yang diharapkan bantuannya selain kampus adalah perbankan dan CSR BUMN, Dinas Kesehatan dan BPOM, KemenkumHAM, Notaris, Dinas Pangan, Pemerintah daerah .

#### IV. Kesimpulan

1. Terkait kebutuhan UMKM akan fasilitasi legalitas sangat jelas mereka membutuhkan, tidak hanya itu, akan tetapi perlu didampingi hingga operasionalnya dan bermanfaat bagi usahanya
2. Dukungan stakeholders termasuk kampus dalam rangka kesiapan ekspor sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, utamanya dari kampus, perbankan dan CSR BUMN, Dinas Kesehatan dan BPOM, KemenkumHAM, Notaris, Dinas Pangan, Pemerintah daerah.

#### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Dikti yang telah memfasilitasi pelaksanaan riset ini, juga kepada Universitas YARSI dan para mitra riset di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

#### Daftar Pustaka

##### A. Buku

Khairin FN, Kusumawardani A, Ginting YL, Syakura MA. (2021). *UMKM Tangguh: Digitalisasi dan Transformasi Hijau*. Surabaya (ID): Pustaka Aksara.

##### B. Jurnal

Amriani, R.F. dan Prihatin, P.S. (2019). *Sience Techno Park (STP) : Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Riau*. *Jurnal Publika*. 2019. Volume 5 (2) tahun <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/4342>

Astuti PR, Kartono, Rahmadi. 2020. Pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Volume 8(2): 248-256.

Chamsuk W, Phimonsathien T, Fongsuwan W. 2015. Research and development (R&D) capabilities and innovation capability that affect the enterprise competitive advantage in the Thai automotive parts industry: SEM approach. *International Journal of Arts & Science*. Volume 8(2): 441-457.

Hartini S. 2012. Peran Inovasi: Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja Bisnis. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Volume 14(1): 82-88.

Gunawan, I.G.D. Peningkatan Kualitas Dosen melalui Implementasi Regulasi Beban Tugas Dosen *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2015. Volume 1 (2): 97-105  
<http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/55/64>

Jayakumar, T. 2016. Behavioral Lessons from Flipkart's Big-Billion Day Sale', *Competitiveness Review*. Volume. 26 (4) 453-75  
<<https://doi.org/10.1108/CR-03-2015-0019>>.

Kamalia, P.U dan Andriansyah, E.H. (2021). Independent Learning-Independent Campus (MBKM) in Students' Perception, *Jurnal Kependidikan*. Volume 7 (4) <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/4031>

- Kremez, Z. Frazer, Z, Weaver, S, Quach, S. (2019). 'E-commerce Structures for Retail and Service Franchises', *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 2019 <<https://doi.org/10.1108/apjml-11-2018-0461>>.
- Macchion, L Gio, A.D., Caniato, F, Caridi, M. (2017). Strategic Approaches to Sustainability in Fashion supply Chain Management. *Journal of Production Planning & control*. <http://dx.doi.org/10.1080/09537287.2017.1374485>
- Man T, Lau T, Chan K. 2002. The competitiveness of small and medium enterprises. *Journal of Business Venturing*. Volume 17(2): 123-142.
- Muhammad, N.A., Muhyiddin, Faisal, A and Anindito, I.A. The Study of Development of Science and Technopark (STP) in Indonesia, *The Indonesian Journal of Dev. Planning*, 2017. Volume 1 (1).
- Mustafa, M. Alifah, S. Taufik, M. (202). Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Techno Park di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*. Volume 14 (1).
- Retnaningsih. 2020. Strategi Pengembangan Science Techno Park melalui Ekosistem Inovasi dalam rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Sumsel*. Volume 3 (1) (<https://ejournal.sumselprov.go.id/pptk/article/view/114>).
- Sayekti WN. 2018. Tantangan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. *Info Singkat*. Volume 10 (5): 19-24.
- Soares, A, Nurpratiwi, R, Makmur, M. 2015. Peranan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISIP)* Volume 4 (2) <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/102#:~:text=Peranan%20pemerintah%20daerah%20dalam%20perencanaan%20pembangunan%20daerah%20adalah%20mempunyai%20wewenang,pemerintahan%20dan%20pembangunan%20di%20daerah>.
- Yulianti, M. 2016. Membangun Perilaku Inovatif Perguruan Tinggi. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*. Volume 3 (1) <https://journal.trunojoyo.ac.id/jsmb/article/view/2566>
- Zulfikar, W dan Jumiati, I.E., (2020). Formulasi Kebijakan Roadmap Inovasi Daerah di Kabupaten Bekasi, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*. Volume. 8 (2).